

**HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
DAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PADA SEKTOR FINANSIAL
(Studi Pada Perusahaan Finansial yang Tercatat di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2010)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

SASKIYA RAHMA WARDHANI

NIM C2C 309 015

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Saskiya Rahma Wardhani

Nomor Induk Mahasiswa : C2C309015

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Judul Skripsi : **HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
DAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PADA SEKTOR
FINANSIAL**

Dosen Pembimbing : Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt

Semarang, Agustus 2011

Dosen Pembimbing,



Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt

NIP. 19810813 200801 2007

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Saskiya Rahma Wardhani

Nomor Induk Mahasiswa : C2C309015


Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Judul Skripsi : **HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
DAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PADA SEKTOR
FINANSIAL**

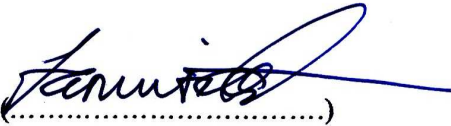
Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 24 Agustus 2011

Tim Penguji :

1. Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt


(.....)

2. H. Tarmizi Achmad, MBA., Ph.D., Akt


(.....)

3. Dra. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Saskiya Rahma Wardhani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Hubungan Antara Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Sektor Finansial** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 15 Agustus 2011

Yang membuat pernyataan,

Saskiya Rahma Wardhani

NIM. C2C309015

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the relationship between certain characteristics of corporate governance on the disclosure of corporate social responsibility on companies listed in Indonesia Stock Exchange. Disclosure of corporate social responsibility by using modified Hackton and Milne research indicators. Review of previous studies show the diversity of results. Therefore, this research attempts to develop a previous study by using the five characteristics of corporate governance as independent variables. They are size of the board of commissioners; independent commissioners, independent audit committees, government ownership, and presence of women the board of commissioners. Company size and profitability is use as a control variable.

This research sample is financial sector in 2010 by using method of purposive sampling. There are 45 company fulfilling criterion as this research sample. The method analysis of this research used multiple regression analysis by using SPSS for Windows 17.0.

The results of this research indicate that the size of the board of commissioners, government ownership, independent audit committee, and company size have a positive and significant relation on the disclosure of corporate social responsibility; but the independent commissioners, the presence of women in the board of commissioners, and profitability does not have a significant relationship. These results of this research generally coincide with the previous research findings on disclosure of corporate social responsibility.

Keywords: Disclosure of Corporate Social Responsibility, Size of The Board of Commissioners, Independent Commissioners, Independent Audit Committees, Government Ownership, Presence of Women in The Board of Commissioners,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan antara beberapa karakteristik *corporate governance* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian Hackton and Milne yang dimodifikasi (1999). Tinjauan mengenai penelitian sebelumnya menunjukkan keanekaragaman hasil. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menggunakan lima karakteristik *corporate governance* sebagai variabel independen. Lima variabel independen tersebut yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit independen, kepemilikan pemerintah dan keberadaan wanita dalam dewan komisaris. Penelitian ini juga menyertakan ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel kontrol.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pada penelitian ini menggunakan 45 perusahaan yang termasuk dalam kriteria pengambilan sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS *for windows* 17.0.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, kepemilikan pemerintah, komite audit independen dan ukuran perusahaan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan; sedangkan dewan komisaris independen, keberadaan wanita dalam dewan komisaris, dan profitabilitas tidak berhubungan secara signifikan. Hasil penelitian ini secara umum sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kata kunci: Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit independen, kepemilikan pemerintah, keberadaan wanita dalam dewan komisaris

KATA PENGANTAR

Sepuluh tahun terakhir istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer karena GCG salah satu kunci sukses perusahaan dalam memenangkan persaingan bisnis global. *Responsibility* adalah salah satu prinsip GCG yang berkaitan erat dengan *Corporate Social Responsibility* dan merupakan aspek pertanggungjawaban dari setiap kegiatan perusahaan yang tidak terlepas dengan masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial tidak hanya pada perusahaan industri tetapi juga pada sektor finansial. Oleh karena itu perlu diketahui hubungan karakteristik GCG dan pengungkapan tanggung jawab sosial pada sektor finansial.

Penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul "Hubungan Antara Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Sektor Finansial" dapat terselesaikan. Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, bantuan, dukungan dan kerjasama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Penulis melalui kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan dedikasi kepada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

2. Bapak Drs. H. Sudarno, M.Si., Ph.D, Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
3. Ibu Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, SE., MSi., Akt., selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasihat dan saran selama studi.
5. Seluruh Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan nasihat, dukungan, kesempatan, bantuan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
6. Orang tua tercinta, kakak tersayang (mas Ndoeng dan mba Astie) beserta seluruh keluarga besar penulis atas segala pengorbanan, cinta dan kasih sayang, motivasi, serta ketulusan doa yang menambah semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Mas Sugeng Riyadi atas segala dukungan, motivasi, cinta dan kasih sayang, serta ketulusan doa yang menambah semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Sahabatku Succi, Mba Kiqi, Nicklodeon, Donna, Indri, Nopita, untuk semua dukungannya.
9. Teman – teman kosan (De’ Tya, Ninotz, Dessy, Nova, Sari, Bella), untuk segala canda tawa, ilmu, dan dukungannya.

10. Teman-teman R2 Akuntansi Angkatan 2008 & 2009 (Lince, Astrong, Monica, Daud, Isya, Ina, Oviek, Maya, Ira, Shera, Mba Anie, Dita bambang, Icacaca, Ayoe, Gals, Aser, Om Har, SiTyo, Mbambing, Mamo, Adit, Akin, Singgih, Mas Ronny, Bang Jo, Mas Widie, Mas Sigit '08,) untuk kebersamaannya.
11. Teman satu bimbingan, Mba Diah untuk diskusi – diskusi dan ilmunya
12. Temen- temen KKN Mijen 2010, Mas Arief, Fazar, Dago, Okta, Tommy, Bang Abdi, Mas Aan, Mas Rommy, Aji, Mas Beyonk, Tika, untuk semua pelajaran hidup dan kebersamaan yang tak kan terlupa.
13. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Melalui kesempatan terakhir ini penulis berharap skripsi yang ditulis dapat bermanfaat dan menambah informasi bagi yang membutuhkan.

Semarang, Agustus 2011

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ciri – ciri orang berilmu, ialah dari tutur katanya yang bisa membuat tentram dan bahagia orang lain.

(KH. Ahmad Dahlan)

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.

(Mahatma Gandhi)

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

(Bung Karno)

*Persembahan terbaikku untuk:
Papa dan mama tercinta
Mbak Astie dan Mas Indoeng
Semua yang peduli pada bangsa ini*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II Telaah Pustaka	9
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	9
2.1.1 Teori Legitimasi	9

2.1.2 Teori Agensi	13
2.1.3 Teori Stakeholders	16
2.2 Pengertian Lembaga Keuangan	19
2.3 <i>Corporate Social Responsibility</i>	20
2.3.1 Pengertian dan Konsep CSR	20
2.3.2 Pengungkapan CSR	22
2.4 Good Corporate Governance (GCG)	25
2.4.1 Pengertian dan Konsep GCG	25
2.4.2 Dewan Komisaris	31
2.4.3 Komite Audit	35
2.5 Penelitian Terdahulu	37
2.6 Kerangka Pemikiran	42
2.7 Hipotesis	43
2.7.1 Hubungan antara Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan CSR	43
2.7.2 Hubungan antara Proporsi Komisaris Independen dan pengungkapan CSR.....	45
2.7.3 Hubungan antara Komite Audit Independen dan Pengungkapan CSR	46
2.7.4 Hubungan antara Kepemilikan Pemerintah dan Pengungkapan CSR	47
2.7.5 Hubungan antara Keberadaan Wanita dalam Dewan Komisaris dan Pengungkapan CSR.....	48

2.7.6 Hubungan antara Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan CSR	50
2.7.7 Hubungan antara Profitabilitas dan Pengungkapan CSR	51
BAB III Metode Penelitian	52
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	52
3.1.1 Variabel Dependen	52
3.1.1.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	52
3.1.2 Variabel Independen	53
3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris	53
3.1.2.2 Komisaris Independen	53
3.1.2.3 Komite Audit Independen.....	54
3.1.2.4 Kepemilikan Pemerintah.....	54
3.1.2.5 Keberadaan Wanita dalam Dewan Komisaris.....	55
3.1.3 Variabel Kontrol	55
3.1.3.1 Ukuran Perusahaan	55
3.1.3.2 Profitabilitas	56
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	56
3.3 Jenis dan Sumber Data	57
3.4 Metode Pengumpulan Data	57
3.5 Metode Analisis Data.....	58
3.5.1 Uji Asumsi Klasik	58
3.5.1.1 Uji Normalitas	58
3.5.1.2 Uji Multikolinearitas	59

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas	59
3.5.2 Analisis Regresi Berganda	60
3.5.3 Pengujian Hipotesis	62
3.5.3.1 Uji Pengaruh Simultan (F test)	63
3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi(R ²)	64
3.5.3.3 Uji Parsial (t test)	64
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	65
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	65
4.2 Analisis Data.....	65
4.2.1 Statistik Deskriptif	65
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	69
4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas	69
4.2.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas	71
4.2.2.3 Hasil Uji Heterokedastisitas	72
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda	74
4.3 Interpretasi Hasil.....	77
4.3.1 Pengungkapan CSR (<i>corporate Social Responsibility</i>).....	77
4.3.2 Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan Pengungkapan CSR	79
4.3.3 Hubungan Proporsi Komisaris Independen dengan Pengungkapan CSR.....	80
4.3.4 Hubungan Komite Audit Independen dengan Pengungkapan CSR	80

4.3.5 Hubungan Kepemilikan Pemerintah dengan Pengungkapan CSR	81
4.3.6 Hubungan Keberadaan Wanita dalam Dewan Komisaris dengan Pengungkapan CSR.....	82
4.3.7 Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Pengungkapan CSR.....	83
4.3.8 Hubungan Profitabilitas dengan Pengungkapan CSR.....	83
Bab V Penutup	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Keterbatasan Penelitian	86
5.3 Saran	87
Daftar Pustaka	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	40
Tabel 4.1 Ringkasan Perolehan Sampel Penelitian	65
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	66
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi	66
Tabel 4.4 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov (K-S)	71
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	72
Tabel 4.6 Hasil Uji Glejser	74
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Untuk <i>CSR Disclosure</i>	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur <i>Board of Director</i> dalam <i>One Tier System</i>	31
Gambar 2.2 Struktur <i>Board of Director</i> dalam <i>TwoTier System</i>	32
Gambar 2.3 Struktur BoD dan BoC dalam <i>Two Tiers System di Indonesia</i>	33
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran	43
Gambar 4.1 Grafik Histogram	70
Gambar 4.2 Grafik Normal PP Plot of Regrassion Standardized Residual	70
Gambar 4.3 Scatterplot	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Lembar Check-List Pengungkapan Tanggug Jawab Sosial	
Perusahaan Pada Sektor Finansial Di Indonesia	96
Lampiran B Daftar Perusahaan Sampel	99
Lampiran C Rekapitulasi Data Penelitian	101
Lampiran D Pengungkapan CSR pada Perusahaan di Sektor Finansial	103
Lampiran E Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 17.0	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep *Good Corporate Governance* selama sepuluh tahun terakhir ini semakin populer, terlebih setelah pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkannya sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat dalam rangka pemulihan sektor ekonomi. Hal itu diwujudkan dalam sebuah keyakinan bahwa GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka.

Pada dasarnya terdapat lima prinsip dalam GCG, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, serta *Fairness*. Salah satu prinsip penting dalam GCG adalah *responsibility*, karena erat kaitannya dengan CSR dan merupakan aspek pertanggungjawaban dari setiap kegiatan perusahaan, yang tidak terlepas dengan masyarakat sekitar. Penerapan konsep *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Daniri, 2009).

Corporate Social Responsibility merupakan informasi yang wajib diungkapkan baik dalam *annual report* perusahaan maupun disajikan secara terpisah dalam *sustainability report*. (Post et.al.,2002 dalam Solihin 2009). Dalam perkembangannya terdapat suatu gagasan yang dikemukakan oleh

Elkington (1997), dikenal dengan *The Triple Bottom Line*. Pada gagasan tersebut dikemukakan bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, dimana *bottom lines* selain aspek finansial juga terdapat aspek sosial dan lingkungan. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).

Berdasarkan standar dari Bank Dunia, terdapat beberapa komponen utama dalam CSR yang meliputi : (1) perlindungan lingkungan, (2) jaminan kerja, (3) Hak Asasi Manusia, (4) interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, (5) standar usaha, (6) pasar, (7) pengembangan ekonomi dan badan usaha, (8) perlindungan kesehatan, (9) kepemimpinan dan pendidikan, dan (10) bantuan bencana kemanusiaan. Bagi perusahaan yang berupaya untuk membangun citra positif perusahaannya, maka kesepuluh komponen tersebut harus diupayakan pemenuhannya. Dari uraian tersebut terlihat bahwa pelaksanaan CSR pada suatu perusahaan sangatlah bermanfaat.

Manfaat yang akan diperoleh perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosialnya selain meningkatkan citra positif perusahaan, akses modal, mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*), juga perusahaan dapat memperoleh legitimasi dengan memperlihatkan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan CSR dalam media termasuk dalam laporan tahunan perusahaan

(Daniri 2009; Machmud dan Djakman, 2008). Ghozali dan Charriri (2007) menyatakan bahwa praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan.

Utama (2007) mengungkapkan bahwa saat ini tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Sampai saat ini belum terdapat kesepakatan standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR (www.ui.edu). Di Indonesia, praktik CSR belum menjadi perilaku umum, karena banyak perusahaan yang menganggapnya sebagai *cost center*. Namun sejalan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan akan informasi serta desakan globalisasi, tuntutan menjalankan CSR semakin besar. Sehingga penerapannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga pada sektor finansial. Sektor finansial diharapkan tidak hanya melaksanakan tugas-tugas utama sebagai lembaga keuangan melainkan juga diminta untuk tetap memiliki kepedulian terhadap lingkungan (komunitas) sebagai wujud *corporate social responsibility*-nya. Dalam kenyataannya, sekarang ini sudah banyak industri yang bergerak dalam sektor finansial melakukan dan melaporkan kegiatan CSR-nya. Namun masih terdapat pula perusahaan pada sektor finansial yang

belum mengungkapkan CSR-nya. Hal ini dikarenakan di Indonesia belum memiliki *CSR guidelines* untuk institusi keuangan seperti halnya China.

Pentingnya mengungkapkan CSR pada sektor keuangan telah terbukti dari sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR pada sektor keuangan di beberapa negara sudah cukup banyak dilakukan. Berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh Branco (2006) pada sejumlah bank-bank Portugis, diyakini bahwa *corporate social responsibility* merupakan alat yang sangat penting bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan *stakeholders*-nya. Hal ini sejalan dengan pernyataan McDonald and Rudle-Thiele (2008) yang mengatakan bahwa program-program CSR yang dilaksanakan hampir seluruh bank-bank ritel di dunia bertujuan untuk memperkuat reputasi bank dan hubungan dengan para *stakeholder*. Selain itu juga penelitian yang dilakukan Brian D, Netto dkk (2011) pada sektor finansial di Bangladesh menyatakan bahwa dengan melakukan pengungkapan *corporate social responsibility*, perusahaan dapat meningkatkan *image* dan memperoleh keunggulan kompetitif.

Berbagai penelitian mengenai hubungan antara karakteristik *corporate governance* dan pengungkapan CSR telah banyak dilakukan dan menunjukkan berbagai macam hasil. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2003) dan Sulastini (2007) yang menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara karakteristik *corporate governance* khususnya ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Said, et.al., (2009) menemukan hubungan yang tidak signifikan dari kedua variabel tersebut. Menurut Belkaoui dan Karpik (1989)

dalam Sembiring (2003) beragamnya hasil tersebut sebagian disebabkan karena model yang dikembangkan merupakan model yang sangat sederhana dan pengukuran yang digunakan tidak konsisten.

Dari berbagai karakteristik *Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian terdahulu berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, penelitian ini menggunakan lima karakteristik *corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan pemerintah, dan keberadaan wanita dalam dewan komisaris. Kelima karakteristik ini telah digunakan dalam berbagai penelitian terdahulu sehingga dijadikan sebagai pertimbangan.

Secara umum penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu terutama dalam aspek – aspek berikut ini :

1. Penelitian ini menggunakan indikator pengungkapan yang diambil dari penelitian Hackston dan Milne (1999) dengan sedikit penyesuaian yang diharapkan dapat memenuhi aspek - aspek dalam pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Penelitian ini mengembangkan keterbatasan – keterbatasan penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel keberadaan wanita dalam dewan komisaris sebagai penduga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Penelitian ini menggunakan sektor finansial yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sebagai populasi penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Hubungan antara Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Sektor Finansial (Studi pada Perusahaan Sektor Finansial yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap pelaporan pertanggungjawaban sosial sektor finansial di Indonesia?” yang dijabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut :

“Apakah ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, proporsi komite audit independen, kepemilikan pemerintah dan keberadaan wanita dalam dewan komisaris berhubungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang disajikan oleh perusahaan pada sektor finansial dalam *annual report* perusahaan tersebut?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan ada atau tidak hubungan antara ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, proporsi komite audit independen, kepemilikan pemerintah dan keberadaan wanita dalam dewan

komisaris dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang disajikan oleh perusahaan pada sektor finansial dalam *annual report* perusahaan tersebut.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gagasan dan ide untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2) Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada penyajian laporan tahunan.

3) Bagi Ikatan Akuntan Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan standar akuntansi sosial dan lingkungan serta *guidelines CSR* untuk sektor finansial.

4) Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam penyusunan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, khususnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada sektor finansial.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang penelitian ini serta perumusan masalah penelitian yang penyusunannya disesuaikan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori serta penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, bab ini juga dijelaskan susunan pemikiran yang melandasi timbulnya hipotesis penelitian. Pada bagian ini, diuraikan mengenai hubungan antara variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil *output* SPSS.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan penelitian serta implikasi keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan pula saran bagi penelitian mendatang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Legitimasi

Beberapa studi tentang praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah menggunakan teori legitimasi sebagai basis menjelaskan praktik pengungkapan sosial perusahaan (Sembiring, 2003). Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan:

Karena legitimasi merupakan hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai – nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Gray, et. al., (1995) berpendapat bahwa teori legitimasi dan stakeholder merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Hal ini dikarenakan pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat. Berbeda dengan teori stakeholder, teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan alasan yang logis tentang legitimasi organisasi dan mengatakan sebagai berikut :

Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidakselarasan actual atau potensial terjadi diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Landasan teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi (1974) dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan tentang konsep social sebagai berikut :

Semua institusi tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada :

1. Hasil akhir (*output*) yang secara social dapat diberikan kepada masyarakat luas.
2. Distribusi manfaat ekonomi, sosial, atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Di dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber power institusional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat permanen. Oleh karena itu, suatu institusi harus lolos uji legitimasi dan relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memang memerlukan jasa perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari penghargaan (*reward*) yang diterimanya betul – betul mendapat persetujuan masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007).

Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa legitimasi tidak dapat didefinisikan hanya dengan mengatakan “apa yang legal atau illegal”. Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat implisit dan eksplisit (Deegan, 2003). Menurut Deegan (2003), bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk

implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan *legal (uncodified community expectation)*. Ada tiga alasan yang menyebabkan terjadinya korelasi yang tidak sempurna antara hukum dan norma/nilai sosial. Pertama, meskipun hukum sering dianggap sebagai refleksi dari norma dan nilai sosial, sistem hukum formal mungkin terlalu lambat dalam mengadaptasi perubahan norma dan nilai sosial di masyarakat. Kedua, sistem legal didasarkan pada konsistensi sedangkan norma mungkin kontradiktif (*contradictory*). Ketiga, masyarakat mungkin mentolerir perilaku tertentu tetapi tidak menginginkan perilaku tersebut tercantum dalam aturan hukum (Dowling dan Pfeffer, 1975) dalam Ghozali dan Chariri (2007).

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007). Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (O'Donovan, 2002). Ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai – nilai sosial masyarakat sering dinamakan “*legitimacy gap*” dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya (Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). *Legitimacy gap* dapat terjadi karena tiga alasan (Warticl dan Mahon, 1994 dalam Ghozali dan Chariri, 2007):

- a. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah
- b. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah
- c. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Namun demikian, harus diingat bahwa keberadaan dan besarnya *legitimacy gap* bukanlah hal yang mudah untuk ditentukan. Yang penting adalah bagaimana perusahaan berusaha memonitor nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai sosial masyarakat dan mengidentifikasi kemungkinan munculnya gap tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). O'Donovan (2002) menyarankan bahwa ketika terdapat perbedaan antara kedua nilai tersebut, perusahaan perlu mengevaluasi nilai sosialnya dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Perusahaan juga dapat mengubah nilai-nilai sosial yang ada atau persepsi terhadap perusahaan sebagai taktik legitimasi. Jadi, untuk mengurangi *legitimacy gap*, perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yang berada dalam kendalinya, mengidentifikasi publik yang memiliki *power*, dan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan perusahaan kepada publik; sehingga mampu memberikan *legitimacy* kepada perusahaan (Neu, *et al.*, 1998 dalam Ghozali dan Chariri, 2007; Reverte, 2009).

2.1.2 Teori Agensi

Dalam rangka memahami konsep *Good Corporate Governance* (GCG), maka digunakanlah dasar perspektif hubungan keagenan. Hubungan keagenan merupakan hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi *agent* dan pihak yang lain bertindak sebagai *principal* (Hendriksen dan Van Breda, 2000). Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut.

Eisenhardt (1989) dikutip dalam Isnanta (2008) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Teori Agensi mampu menjelaskan potensi konflik kepentingan diantara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Konflik kepentingan ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan dari masing-masing pihak berdasarkan posisi dan kepentingannya terhadap perusahaan (Ibrahim, 2007). Sebagai agen, manajer

bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun demikian manajer juga menginginkan untuk selalu memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002 dalam Isnanta, 2008).

Selain itu, Teori Agensi juga menjelaskan mengenai masalah asimetri informasi (*information asymmetric*). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (Hendriksen dan Van Breda, 2000).

Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba (*earnings management*) mengenai kinerja ekonomi perusahaan sehingga dapat merugikan pemilik (pemegang saham). Manajer akan berusaha melakukan hal tersebut untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetujuan pemilik atau pemegang saham. Penelitian Richardson (1998) dalam Ujijanto dan Pramuka (2007) menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba.

Dalam hal ini berarti apabila manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham maka kecenderungan manajer untuk berbuat curang dengan praktik manajemen laba demi kepentingan pribadi akan semakin tinggi.

Dengan adanya masalah agensi yang disebabkan karena konflik kepentingan dan asimetri informasi ini, maka perusahaan harus menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan biaya keagenan dalam tiga jenis yaitu:

1. Biaya Monitoring (*monitoring cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
2. Biaya Bonding (*bonding cost*), merupakan biaya untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak merugikan prinsipal, atau dengan kata lain untuk meyakinkan agen, bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan tersebut.
3. Biaya kerugian residual (*residual loss*), merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh principal akibat dari perbedaan kepentingan.

Teori Agensi juga menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan (Ibrahim, 2007). Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan mekanisme *good corporate governance* (GCG). GCG sebagai suatu

sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan diharapkan dapat memberikan kepercayaan terhadap manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan. Herawaty (2008) juga menyatakan bahwa *Good corporate governance* (GCG) menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan pemegang saham (terutama *minority interest*).

Konsep GCG berkaitan dengan bagaimana para pemilik (pemegang saham) yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan yang akan merugikan para pemegang saham. Dengan kata lain dengan penerapan *Good corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

2.1.3 Teori Stakeholders

Wibisono dalam Kirana (2009) mengartikan *Stakeholders* sebagai pemangku kepentingan yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh perusahaan. Definisi lain dilontarkan oleh Rhenald Kasali sebagaimana dikutip Wibisono dalam Kirana (2009), yang menyatakan bahwa yang dimaksud para pihak adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan.

Definisi *stakeholder* telah berubah secara substansial selama empat dekade terakhir. Pada awalnya, pemegang saham dipandang sebagai satu – satunya stakeholder perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Pandangan ini didasarkan pada argumen yang disampaikan oleh Friedman (1962) dalam Ghozali dan Chariri (2007) yang mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Namun demikian, Freeman (1983) dalam Ghozali dan Chariri (2007) tidak setuju dengan pandangan ini dan memperluas definisi *stakeholder* dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, termasuk kelompok yang dianggap tidak menguntungkan (*adversarial group*). Misalnya, pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator (Roberts, 1992).

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber – sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang mereka miliki atas sumber tersebut. *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Deegan, 2003). Oleh karena itu, “ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*” (Ullman, 1985 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Lebih lanjut, Ullman (1985) dalam Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa

organisasi akan memilih *stakeholder* yang dipandang penting, dan mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan harmonis antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya.

Berdasarkan argument di atas, teori stakeholder secara eksplisit mempertimbangkan dampak harapan dari kelompok stakeholder yang berbeda dalam masyarakat atas kebijakan pengungkapan informasi mengenai aktivitas perusahaan. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas perusahaan merupakan suatu alat manajemen untuk mengelola kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai kelompok *stakeholder* yang kuat (karyawan perusahaan, pemegang saham, investor, konsumen, regulator, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sebagainya). Oleh karena itu, manajer menggunakan informasi ini untuk mengelola stakeholder yang kuat agar mendapatkan dukungan dari stakeholder dimana dukungan ini berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan (Gray, et al., 1996 dalam Reverte, 2009).

Cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk *manage stakeholder*-nya tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan (Ullman, 1985 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Perusahaan mungkin mengadopsi strategis yang aktif atau pasif. Perusahaan yang mengadopsi strategis aktif akan berusaha mempengaruhi hubungan organisasinya dengan *stakeholder* yang dipandang berpengaruh/penting (Ullman, 1985 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa *active posture* tidak hanya mengidentifikasi *stakeholder*, tetapi juga menentukan *stakeholder* mana yang memiliki kemampuan terbesar dalam mempengaruhi alokasi sumber ekonomi ke perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan *passive*

posture cenderung tidak terus-menerus memonitor aktivitas *stakeholder* dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal untuk menarik perhatian *stakeholder*. Kurangnya perhatian terhadap *stakeholder* (dalam pendekatan *passive posture*) akan mengakibatkan rendahnya tingkat pengungkapan informasi sosial dan rendahnya kinerja sosial perusahaan (Ullman, 1985 dalam Ghazali dan Chariri, 2007).

2.2 Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan adalah lembaga yang mempunyai kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif untuk mendapatkan keuntungan (Muhammad Yasin, 2007). Jadi fungsi lembaga keuangan adalah sebagai lembaga intermediari. Di Indonesia lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Lembaga Keuangan Bank (LKB) merupakan lembaga perantara yang diperbolehkan menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk tabungan. Lembaga Keuangan Bank ini sering juga disebut sebagai perbankan. Dalam praktiknya lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah sebuah badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia serta dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing dan dapat juga sebagai badan hukum asing dalam bentuk perwakilan dari lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri (M. Fuad, 2000). Lembaga Keuangan Bukan Bank tidak diperbolehkan menghimpun dana

dari masyarakat dalam bentuk tabungan melainkan dalam bentuk kertas surat berharga dan kemudian menyalurkannya untuk membiayai kegiatan investasi perusahaan atau konsumsi individu.

Adapun jenis – jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia saat ini diantaranya adalah pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi simpan pinjam, pegadaian, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan asuransi, perusahaan anjak piutang, modal ventura, dana pensiun, dan perusahaan penyedia kartu kredit.

2.3 *Corporate Social Responsibility*

2.3.1 Pengertian dan Konsep CSR

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan. Sejalan dengan hal tersebut, Ebert (2003) dalam Rosmasita (2007) mendefinisikan *corporate social responsibility* sebagai usaha perusahaan untuk menyeimbangkan komitmen-komitmennya terhadap kelompok-kelompok dan individual – individual dalam lingkungan perusahaan tersebut, termasuk di dalamnya adalah pelanggan, perusahaan – perusahaan lain, karyawan, dan investor.

CSR dengan kata lain merupakan operasi bisnis yang tidak hanya berkomitmen untuk menghasilkan keuntungan saja, melainkan juga berkomitmen pada pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Berbagai

definisi di atas sesuai dengan definisi CSR dalam ISO 26000 yang dipublikasikan pada bulan November 2009 (www.csrindonesia.com), yang pada intinya CSR merupakan upaya tanggung jawab perusahaan atas dampak yang terjadi di masyarakat dan lingkungan baik berasal dari keputusan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting*. *Sustainability Reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Laporan keberlanjutan harus menjadi dokumen strategis yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang pembangunan keberlanjutan yang membawanya menuju kepada *core business* dan sektor industrinya. Sedangkan Zhegal & Ahmad (1990) dalam Anggraini (2006) mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sbb :

1. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.
2. Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi, dll.
3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial.
4. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni

5. Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi.

Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan *Legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, 1994, dalam Haniffa, 2005). Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Sayekti dan Wondabio, 2007).

2.3.2 Pengungkapan CSR

Pengungkapan tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai *Corporate social reporting* adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray *et. al.*, 1987 dalam Rosmasita, 2007). Kontribusi negatif perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat, oleh karena itu dengan mengungkapkan informasi-informasi mengenai operasi perusahaan sehubungan dengan lingkungan sebagai tanggung jawab perusahaan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Jadi agar bentuk tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui oleh berbagai pihak

yang berkepentingan, maka hal itu diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Hal serupa disampaikan oleh Darwin (2007) dikutip dalam Machmud dan Djakman (2008) bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan *stakeholders* lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan kepedulian dan tanggung jawab sosial (CSR) dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi perusahaan kepada investor dan *stakeholders* lainnya. Laporan tahunan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan pengungkapan dan pertanggungjawaban kinerja perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat. Para pengguna laporan tahunan seperti analis, investor, masyarakat dan lainnya membutuhkan informasi yang lengkap mengenai laporan tentang suatu perusahaan, sehingga pengungkapan yang lebih rinci mengenai perusahaan akan sangat penting dan bermanfaat untuk melakukan penilaian dan analisis pengambilan keputusan yang akan mereka lakukan.

Dengan melakukan praktik dan pengungkapan CSR, perusahaan akan mendapatkan manfaat tersendiri. Menurut Kotler dan Lee (2005) dalam Solihin (2009) menyebutkan bahwa perusahaan akan terdorong untuk melakukan praktik dan pengungkapan CSR, karena memperoleh beberapa manfaat seperti peningkatan penjualan dan *market share*, memperkuat *brand positioning*,

meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analis keuangan.

Menurut Taridi (2009) ada beberapa manfaat dari praktik dan pengungkapan CSR bagi perusahaan, antara lain:

1. Pengelolaan sumber daya korporasi secara amanah dan bertanggungjawab, yang akan meningkatkan kinerja korporasi secara *sustainable*.
2. Perbaiki citra korporasi sebagai agen ekonomi yang bertanggungjawab (*good corporate citizen*) sehingga meningkatkan nilai perusahaan (*value of the firm*).
3. Peningkatkan keyakinan investor terhadap korporasi sehingga menjadi lebih atraktif sebagai target investasi.
4. Memudahkan akses terhadap investasi domestik dan asing.
5. Melindungi Direksi dan Dewan Komisaris dari tuntutan hukum.

Kewajiban pengungkapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi, antar lain adalah pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyarankan kepada perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab mengenai sosial dan lingkungan, sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 1998) Paragraf kesembilan:

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Secara yuridis formal, pemerintah telah mendukung praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial melalui Undang undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas Bab IV pasal 66 ayat 2(c) dan Bab V pasal 74. Pada Pasal 66 ayat 2 bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

2.4 Good Corporate Governance (GCG)

2.4.1 Pengertian dan Konsep GCG

Corporate Governance atau yang biasa disebut *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki arti sebagai tata kelola perusahaan, merupakan suatu bentuk analogi antara pemerintah suatu Negara dengan pemerintahan dalam suatu perusahaan (Becht et al., 2002 dalam Solihin, 2009). Sebagaimana dalam pemerintahan suatu Negara, dalam mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu muncul sebuah konsep *corporate governance* dalam mengatasi konflik kepentingan tersebut agar perusahaan dapat dikelola dengan baik.

World Bank memdefinisikan *GCG* “ adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat

sekitar secara keseluruhan”. *Forum for Corporate Governance in Indonesia*

(FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *internal* dan *eksternal* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Istilah *corporate governance* itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committe* di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut. Dalam laporan mereka yang dikenal sebagai *Cadbury Report*, laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktek *corporate governance* diseluruh dunia. *Cadbury Report* mendefinisikan *corporate governance* adalah:

“Suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi”. Definisi lain dari *Cadbury Report* memandang *corporate governance* sebagai manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.”

The Organization for Economic Corporation and Development (OECD),

mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“*Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participant in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholder, and spells out the rule and procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance*”

Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan *corporate governance* adalah untuk mengendalikan dan mengarahkan perusahaan agar dapat mendistribusikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu

perusahaan dengan baik atau dengan kata lain GCG bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan (*stakeholders*).

Dalam perspektif yang luas, *corporate governance* didefinisikan dalam pengertian sejauh mana perusahaan telah dijalankan dengan cara yang terbuka dan jujur untuk mempertebal kepercayaan masyarakat luas terhadap mekanisme pasar, yang akhirnya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas. Penerapan *good corporate governance* di perusahaan keuangan publik maupun BUMN diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Karena penerapan *good corporate* juga dimaksudkan untuk mengantisipasi persaingan yang ketat di era pasar bebas. Salah satu hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam penerapan *good corporate governance* adalah tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. Sebab bisnis tidak dapat berjalan dengan baik bila dijalankan dengan cara-cara yang curang dan penipuan baik di lingkungan internal sendiri maupun eksternal perusahaan.

Andriyati (2010) berpendapat bahwa lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran lembaga keuangan berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi lembaga keuangan sebagai pencerminan akuntabilitas lembaga keuangan (*accountability*), dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab lembaga keuangan (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan

kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Dalam hubungan dengan prinsip tersebut lembaga keuangan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

- a. Lembaga Keuangan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal – hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelola risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh lembaga keuangan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia lembaga keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak – hak pribadi
- d. Kebijakan lembaga keuangan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

- a. Lembaga keuangan harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing – masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b. Lembaga keuangan harus meyakini bahwa semua organ organisasinya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG..

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

- a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, lembaga keuangan harus berpegang pada prinsip kehati – hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
- b. Lembaga keuangan harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

- a. Lembaga Keuangan harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder maupun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- b. Lembaga keuangan dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

- a. Lembaga keuangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
- b. Lembaga keuangan harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan lembaga keuangan serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan (Andriyati,2010).

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan – perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat Internasional. Namun, meskipun menyadari pentingnya GCG, banyak pihak yang melaporkan kurangnya penerapan prinsip tersebut oleh perusahaan. Masih banyak perusahaan yang menerapkan GCG atas dasar regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Selain itu, kewajiban penerapan prinsip GCG seharusnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan.

2.4.2 Dewan Komisaris

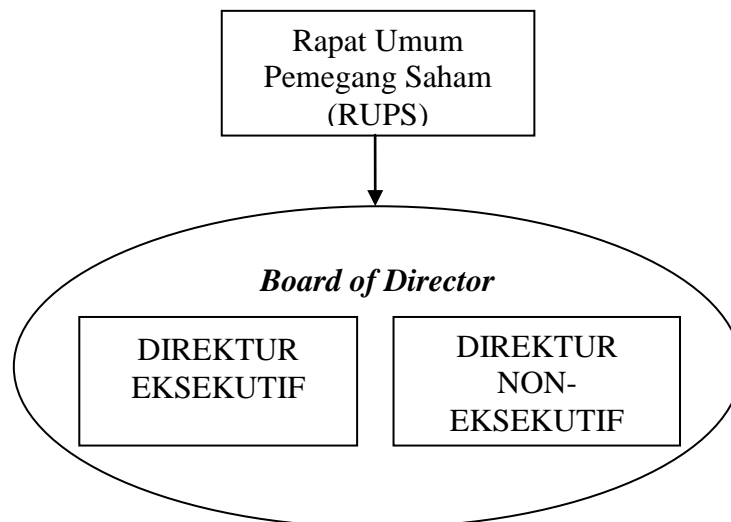
Forum *Corporate Governance* Indonesia (2002) menyebutkan terdapat dua sistem Manajemen yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang

berbeda yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris yaitu:

1. Sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*.

Sistem Satu Tingkat berasal dari Sistem Hukum Anglo Saxon. Dalam sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu Dewan Direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (Non Direktur Eksekutif). Negara-negara yang menggunakan *One Tier System* misalnya adalah Amerika Serikat dan Inggris (FCGI,2002).

Gambar 2.1
Struktur Board of Director dalam One Tier System

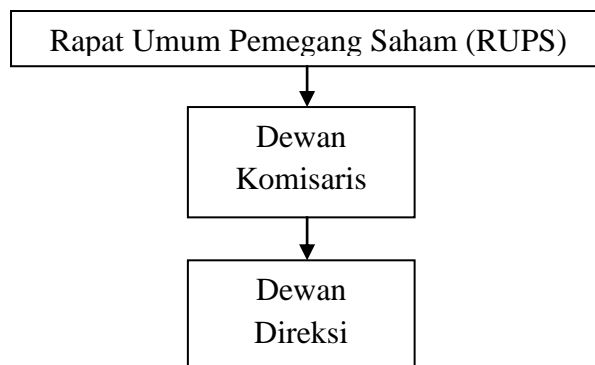


Sumber : FCGI (2002)

2. Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*.

Sistem Dua Tingkat berasal dari Sistem Hukum Kontinental Eropa. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Dewan Direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris (FCGI,2002).

Gambar 2.2
Struktur Board of Director dalam Two Tier System

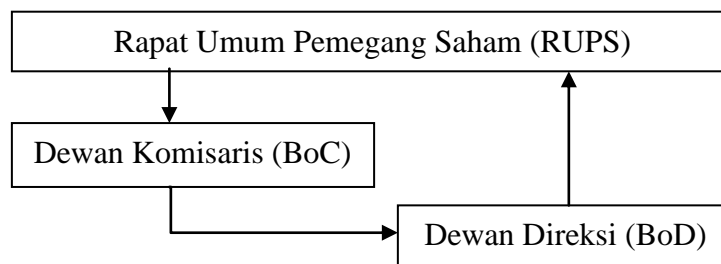


Sumber : FCGI (2002)

Di Indonesia *two tiers system* diterapkan dengan beberapa perubahan, yaitu kedudukan Dewan Komisaris yang sejajar/ tidak langsung membawahi *Management Board* (Direksi), namun memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi (KNKG, 2006). Dewan komisaris di Indonesia tidak berhak mengangkat dan memberhentikan direksi, karena posisi yang sejajar di antara keduanya, tidak seperti model *Continental Europe*. Berdasarkan Undang – undang No. 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, dewan komisaris hanya berhak memberhentikan anggota direksi secara sementara, bukan bersifat tetap.

Gambar 2.3
Struktur BoD dan BoC dalam Two Tiers System di Indonesia



Sumber :FCGI (2002)

Kedua dewan tersebut harus bersinergi dalam menjalankan tugasnya, meskipun memiliki fungsi yang berbeda. Namun keduanya memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. KNKG (2006) menyatakan, tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada :

1. Terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen resiko;
2. Tercapainya imbal hasil (return) yang optimal bagi pemegang saham;
3. Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar;
4. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97, dijelaskan bahwa Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Lebih lanjut Pasal 98 UUPM menegaskan, bahwa Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG,2006).

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 dikutip dari FCGI (2002). Dikemukakan bahwa perusahaan yang *listed* di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham

yang minoritas (*bukan controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Beberapa kriteria lainnya tentang Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (*bukan controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2.4.3 Komite Audit

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite Audit memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan

secara menyeluruh (FCGI, 2002). Pada umumnya tanggung jawab komite audit meliputi tiga bidang, yaitu :

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*), adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang Kondisi keuangan, Hasil Usahanya, serta Rencana dan komitmen jangka panjang;
2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*). Tanggung jawab Komite Audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Komite Audit sekurang – kurangnya terdiri dari satu orang Komisaris Independen dan sekurang – kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan. Alasan komite audit terdiri dari komisaris independen dan anggota lain diluar emiten adalah untuk memelihara integritas

serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan dalam mengatasi permasalahan perusahaan.

Tanggung jawab Komite Audit dalam bidang *Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

1. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan;
2. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta yang menyangkut masalah *Corporate Governance* dalam hal di mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait di dalamnya;
3. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan;
4. Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan *Corporate Governance* dan temuan-temuan penting lainnya (www.cic-fcgi.org)

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai CSR telah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di Negara lainnya. CSR saat ini sedang menjadi perhatian dalam dunia usaha kaitannya dengan *Corporate Governance*, sehingga penelitian mengenai CSR semakin banyak dilakukan dan dikembangkan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan CSR antara lain oleh Sembiring (2005) yang berusaha meneliti faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia. Variabel independen yang digunakan antara lain ukuran perusahaan, profil perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan

leverage perusahaan. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan, profil perusahaan, dan ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia.

Said, *et al.*, (2009) meneliti mengenai pengaruh karakteristik *Corporate Governance* terhadap pengungkapan CSR dengan variabel independen yang digunakan yaitu ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dualitas CEO, komite audit, sepuluh pemegang saham terbesar, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel kepemilikan pemerintah dan komite audit yang berhubungan positif dan signifikan dengan luas pengungkapan.

Novita dan Djakman (2008) menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial pada 107 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Novita dan Djakman (2008) menggunakan indikator *Global Reporting Initiative (GRI)* sebagai *Corporate Social Disclosure Index (CSDI)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ghazali (2007) dalam penelitiannya yang berjudul *Ownership structure and corporate social responsibility disclosure* menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan CSR. Variabel yang digunakan adalah *Ownership concentration, Director ownership, government ownership, company size, profitabilitas, dan industry*. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel

yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR adalah variabel *government ownership* dan *director ownership*.

Khan (2010) menyelidiki informasi pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada 60 bank komersial yang terdaftar di Bursa Efek Bangladesh dan menyelidiki pengaruh potensial elemen *corporate governance* pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan dewan komisaris independen dan adanya orang yang berkebangsaan asing dalam dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Huafang dan Jianguo (2007) menguji pengaruh struktur kepemilikan dan komposisi dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada 559 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek China. Penelitian ini menguji hubungan antara struktur kepemilikan, komposisi dewan komisaris, dan tingkat pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan *blockholder* yang tinggi, kepemilikan saham luar negeri, dan komposisi dewan komisaris mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Selain itu, kepemilikan manajerial, *state ownership*, dan *legal-person ownership* mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan. Sebaliknya, dualitas CEO mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Waryanto (2010) menguji pengaruh karakteristik *good corporate governance* terhadap pengungkapan CSR dengan variabel independen yang digunakan antara lain ukuran dewan komisaris, jumlah pertemuan dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah pertemuan komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan terkonsentrasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa hanya variabel kepemilikan terkonsentrasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Alat Analisis	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
Sembiring (2005)	Regresi Berganda	Independen : <i>Size,</i> Profitabilitas, Profil perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Dan Leverage Dependen : <i>CSR Disclosure</i>	Ukuran perusahaan, profil perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan CSR, sedangkan variabel profitabilitas dan leverage tidak menunjukkan hubungannya dengan pengungkapan CSR
Ghazali (2007)	Regresi Berganda	Independen: <i>Ownership concentration,</i> <i>Director ownership,</i> <i>Government ownership,</i> <i>Size,</i> <i>Profitability,</i> <i>Industry</i> Dependen :	<i>Government ownership</i> dan <i>Director ownership</i> berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR, sedangkan variabel lainnya tidak menunjukkan pengaruh terhadap pengungkapan CSR

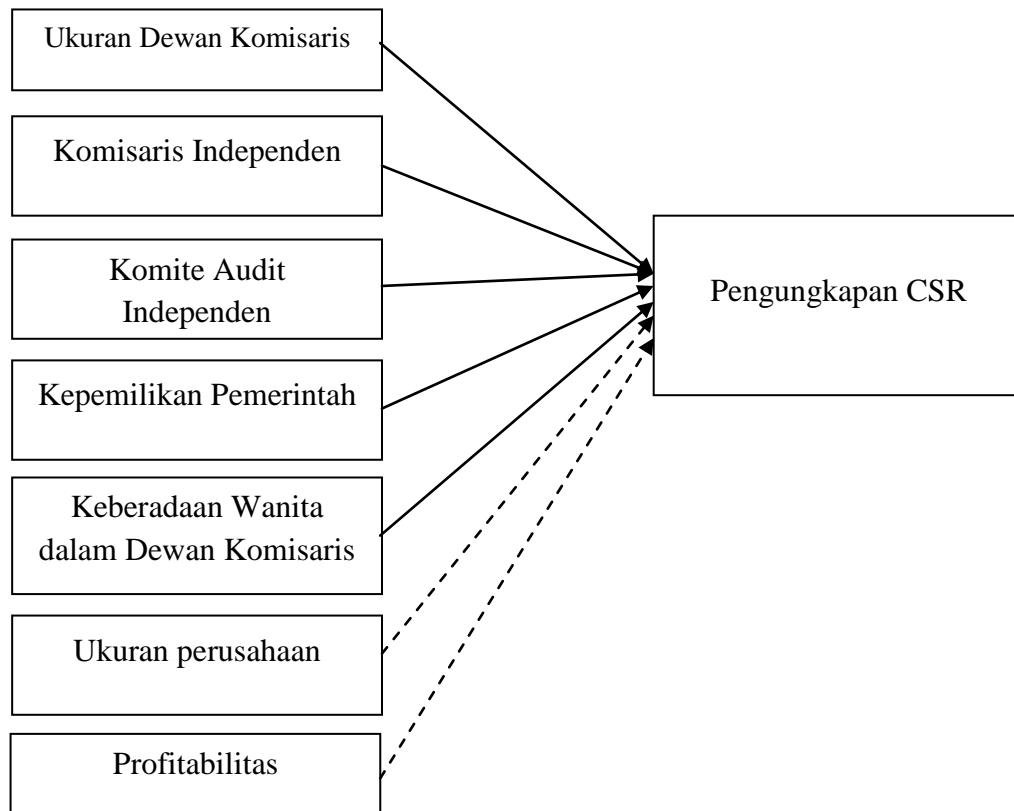
		<i>CSR Disclosure</i>	
Huafang dan Jianguo (2007)	OLS	Independen : <i>Blockholder Ownership, Kepemilikan manajerial, State Ownership, Legal Person Ownership, Kepemilikan Saham oleh pihak asing, Dewan komisaris Independen, Dualitas CEO</i> Dependen : <i>CSR Disclosure</i>	<i>Blockholder Ownership, dan Kepemilikan saham oleh pihak asing yang tinggi dan adanya Dewan Komisaris Independen akan meningkatkan tingkat pengungkapan sukarela. Sedangkan Kepemilikan Manajerial, State Ownership, dan Legal-Person Ownership tidak mempengaruhi pengungkapan secara signifikan.</i>
Novita dan Djakman (2008)	Regresi Berganda	Independen : kepemilikan asing. kepemilikan institusional Dependen: pengungkapan CSR	Kedua struktur kepemilikan (asing dan institusional) tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia
Said <i>et al</i> (2009)	Regresi Berganda	Independen : <i>board size, board independence, duality, audit committee, managerial, foreign, government ownership</i> Dependen: <i>CSR Disclosure</i>	<i>Government ownership dan audit committee berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan publik di Malaysia</i>
Khan (2010)	Regresi Berganda	Independen: Direktur non-eksekutif (dewan komisaris), keberadaan bangsa asing, dan keterwakilan perempuan pada	Direktur non-eksekutif dan keberadaan bangsa asing berpengaruh signifikan terhadap pelaporan tanggung jawab sosial.

		dewan Dependen: Pelaporan tanggung jawab sosial	
Waryanto (2010)	Regresi Berganda	Independen : Ukuran dewan komisaris, Jumlah pertemuan dewan komisaris, Dewan komisaris independen, Ukuran komite audit, Jumlah pertemuan komite audit, Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional, Kepemilikan asing, dan Kepemilikan terkonsentrasi Dependen : Pengungkapan CSR Kontrol : <i>Size, Leverage</i>	Kepemilikan saham terkonsentrasi, <i>size</i> , dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara karakteristik *corporate governance* dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka kerangka pemikiran dapat dinyatakan dalam gambar 2.4.

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran



Sumber Data yang Diolah, 2011

Keterangan :

———— : **Variabel Independen**

----- : **Variabel Kontrol**

2.7 Hipotesis

2.7.1 Hubungan antara Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan CSR

Berdasarkan teori agensi, Dewan Komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan

manajemen. Melalui peran monitoring oleh Dewan Komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat terjamin kelangsungannya (Sulastini, 2007). Dengan demikian, dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar ukuran Dewan Komisaris, maka komposisi pengalaman dan keahlian (*experience and expertise*) yang dimiliki oleh Dewan Komisaris semakin meningkat, sehingga dapat melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik (Akhtaruddin, *et. al.*, 2009). Dengan proses monitoring yang baik, maka diharapkan pengungkapan informasi sosial (CSR) semakin luas, dikarenakan kemungkinan manajer untuk tidak menyampaikan informasi dapat dikurangi.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara ukuran Dewan Komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan. Hasil penelitian Sembiring (2005) dan Sulastini (2007) menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara ukuran Dewan Komisaris dengan pengungkapan CSR di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan, maka monitoring akan berjalan dengan baik dan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat perusahaan akan semakin luas. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

**H1 = Ada hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dan luas
pengungkapan CSR**

2.7.2 Hubungan Proporsi Komisaris Independen dan Pengungkapan CSR

Keberadaan Komisaris Independen di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004. Dengan adanya ketentuan ini memberikan pengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen dalam operasi perusahaannya, diantaranya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Komisaris Independen diperlukan untuk meningkatkan independensi Dewan Komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya (Muntoro,2006). Semakin besar proporsi komisaris independen, maka kemampuan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan akan semakin objektif.

Komisaris independen dianggap sebagai alat untuk memantau perilaku dewan direksi (manajemen), sehingga mengakibatkan lebih banyak pengungkapan sukarela tentang informasi perusahaan (Huafang dan Jianguo, 2007 dalam Said, *et al.*, 2009; Khan 2010). Selain itu, Forker (1992) dalam Said, *et al.* (2009) menemukan bahwa dewan komisaris independen dengan persentase lebih besar dalam dewan komisaris meningkatkan pemantauan kualitas pengungkapan finansial dan sosial, dan mengurangi manfaat informasi dari pemotongan pajak. Akan tetapi, Said, *et al.* (2009) tidak menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara dewan komisaris independen dan pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 = Ada hubungan positif antara proporsi komisaris independen dan pengungkapan CSR

2.7.3 Hubungan antara proporsi Komite Audit Independen dan Pengungkapan CSR

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 disebutkan bahwa Komite Audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal anggotanya terdiri dari tiga orang yaitu 1 orang merupakan komisaris independen dan 2 orang anggota lainnya berasal dari luar emiten (bersifat independen). Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan besar kecilnya organisasi dan tanggung jawab. Di beberapa negara, ketentuan mengenai keberadaan komite audit berangsur-angsur diterima sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Sejalan dengan kecenderungan internasional, persyaratan semacam ini juga telah ditetapkan di Indonesia melalui pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan pada bulan Mei 2002. Komite audit memiliki peranan yang penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi, berbagai ketentuan dan peraturan mengenai komite audit, seperti: Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000, yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit.

Tugas utama Komite Audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal. Demikian juga fungsi

dari komite audit termasuk di dalamnya adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap adanya kontrol internal yang lebih baik. Keberadaan komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi *monitoring* kualitas tinggi dan berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi yang lebih kepada pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, diharapkan dengan semakin besar ukuran komite audit, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan kualitas pengungkapan informasi sosial perusahaan pun semakin meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

**H3 = Ada hubungan positif antara proporsi Komite audit
Independen dan luas pengungkapan CSR**

2.7.4 Hubungan antara Kepemilikan Pemerintah dan Pengungkapan CSR

Intervensi pemerintah dalam kepemilikan di perusahaan, mungkin dapat memberikan tekanan kepada perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi, karena pemerintah merupakan badan yang dipercaya oleh rakyat. Pemerintah yang juga bertindak sebagai regulator, apabila memiliki proporsi saham pada sebuah perusahaan, maka pemerintah memiliki kekuatan untuk menekan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah mengenai CSR.

Penelitian Ghazali dan Wheetman (2006) dalam Said *et al.* (2009) menemukan bahwa kepemilikan pemerintah tidak signifikan dalam menjelaskan luas pengungkapan sukarela. Namun penelitian Eng dan Mak (2003) dalam Said *et al.*, (2009) menemukan bahwa kepemilikan oleh pemerintah memiliki asosiasi

dengan meningkatnya pengungkapan sukarela. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Mohd Nasir dan Abdullah (2004), yang lebih jauh menemukan bahwa luasnya kepemilikan oleh pemerintah mempengaruhi jumlah pengungkapan sukarela. Amran dan Devi (2008) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa kepemilikan pemerintah yang semakin besar akan menghasilkan pengungkapan CSR yang lebih baik.

Berdasarkan asumsi bahwa pemerintah sebagai regulator dan badan kepercayaan masyarakat, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H4 = Ada hubungan positif antara kepemilikan pemerintah dan luas pengungkapan CSR

2.7.5 Hubungan antara Keberadaan Wanita dalam Dewan Komisaris dan Pengungkapan CSR

Literatur empiris mengenai *corporate governance* menunjukkan bahwa keragaman dewan komisaris telah berubah menjadi suatu unsur atas susunan *corporate governance* yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Khan, 2010). Branco dan Rodrigues (2008) menyatakan bahwa tema keanekaragaman dewan komisaris sesuai dengan struktur teori *stakeholder*. Penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa keragaman dewan komisaris terkait dengan orientasi yang kuat terhadap pelaporan sosial perusahaan dan intensitas kinerja sosial yang lebih tinggi (Wang dan Coffey, 1992).

Akan tetapi, Khan (2010) menemukan bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan berarah positif pada bank komersial di Bangladesh. Carter, *et al.* (2003) menunjukkan bukti empiris mengenai hubungan positif yang signifikan antara keanekaragaman dewan komisaris, yang didefinisikan sebagai persentase wanita, Afrika, Amerika, Asia dan Hispanik dalam dewan komisaris; dan nilai perusahaan. Carter, *et al.* (2003) berpendapat mendukung adanya keragaman dewan komisaris yaitu keragaman dewan komisaris dapat meningkatkan independensi dewan komisaris dengan alasan bahwa adanya perbedaan gender, etnis, atau latar belakang budaya dapat mengajukan pertanyaan yang tidak akan muncul dari dewan komisaris dengan latar belakang yang lebih tradisional.

Selain itu, Huse dan Solberg (2006) mengilustrasikan bahwa wanita dapat diikutsertakan dalam dewan komisaris melalui pembentukan aliansi, mempersiapkan dan melibatkan dirinya dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh dewan komisaris, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang penting. Adams dan Ferreira (2004) dalam Khan (2010) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris wanita yang lebih tinggi cenderung membuat rapat dewan lebih memungkinkan dan pola kehadiran yang khusus pada pertemuan dewan komisaris, dimana membuat dewan komisaris yang berbeda lebih sukses dibandingkan dewan komisaris yang homogen. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5 = Ada hubungan positif antara keberadaan wanita dalam dewan komisaris dan pengungkapan CSR

2.7.6 Hubungan antara Ukuran perusahaan dan Pengungkapan CSR

Secara umum, perusahaan besar akan melakukan pengungkapan informasi sosialnya lebih banyak daripada perusahaan kecil. Terdapat beberapa penjelasan mengenai hal tersebut. Diantaranya untuk mendapatkan legitimasi, perusahaan besar akan melakukan aktivitas sosial lebih banyak agar mempunyai pengaruh terhadap pihak – pihak internal maupun eksternal yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Teori Legitimasi menyatakan bahwa perusahaan dapat bertahan apabila masyarakat disekitar perusahaan merasa bahwa perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya sesuai dengan system nilai yang dimiliki masyarakat (Gray et.al., 1986 dalam Rahma Yuliani, 2003).

Di samping itu, teori agensi menyatakan bahwa apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan juga lebih besar, sehingga untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Oleh karena itu, pengungkapan yang lebih besar merupakan cara untuk mengurangi biaya politis sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

2.7.7 Hubungan antara Profitabilitas dan Pengungkapan CSR

Hubungan profitabilitas dengan pengungkapan CSR berdasarkan penelitian ilmiah yang telah banyak dilakukan menghasilkan hasil yang beragam. Donovan dan Gibson (2000) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa berdasarkan teori

legitimasi, salah satu argumen dalam hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal – hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya pada saat tingkat profitabilitas rendah mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “*good news*” kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan kata lain investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa profitabilitas mempunyai hubungan negatif terhadap pengungkapan CSR.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen

3.1.1.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas sosial perusahaan.

Penelitian ini menggunakan *checklist* yang diadopsi dari penelitian Hackston dan Milne (1999) untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan modifikasi. Modifikasi yang dilakukan yaitu dengan mengurangi beberapa item indikator dari *checklist* yang tidak *applicable* dengan industri finansial. Hal ini dikarenakan *checklist* yang digunakan dalam penelitian Hackston dan Milne (1999) untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada industri manufaktur. *Checklist* dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup tujuh kategori, yaitu : lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan kerja, lain- lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum.

Checklist menggunakan pendekatan dikotomi yaitu nilai 1 akan diberikan jika setiap item tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan indikator yang digunakan. Akan tetapi, nilai 0 akan diberikan jika tidak terdapat item tanggung

jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan indikator. Pendekatan seperti ini telah digunakan pada penelitian sebelumnya oleh Novita dan Djakman, 2008. Total *checklist* dihitung untuk mendapatkan jumlah item yang diungkapkan perusahaan. Indeks pengungkapan masing-masing perusahaan kemudian dihitung dengan membagi jumlah item dengan jumlah item yang diharapkan perusahaan sesuai dengan indikator yang digunakan, yaitu lima puluh sembilan item.

Perhitungan indeks pengungkapan ini dinotasikan dalam rumus sebagai berikut :

$$\text{CSRDI} = \frac{V}{59}$$

Dimana,

CSRDI = Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

V = Jumlah item yang diungkapkan perusahaan

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini menggunakan skala rasio yaitu dengan menggunakan indikator ukuran dewan komisaris yang diukur dengan cara menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan (Said,*et al.*, 2009).

3.1.2.2 Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Skala yang digunakan untuk mengukur komposisi

Dewan Komisaris Independen yaitu dengan skala rasio. Indikator tersebut konsisten dengan Said, et al., (2009) yaitu proporsi komisaris independen terhadap total dewan komisaris.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$$

3.1.2.3 Komite Audit Independen

Komite audit Independen merupakan anggota komite audit yang berasal dari luar emiten. Skala yang digunakan untuk proporsi komite audit independen adalah rasio. Indikator komite audit independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proporsi jumlah anggota komite audit suatu perusahaan terhadap jumlah minimal anggota komite audit sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Tahun 2004. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Tahun 2004, komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

$$\text{Komite Audit Independen} = \frac{\text{Anggota Komite Audit Independen}}{\text{Anggota Komite Audit}}$$

3.1.2.4 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah. Variabel kepemilikan pemerintah diukur dengan pendekatan dikotomi yang menggunakan skala 1 jika di dalam perusahaan terdapat

kepemilikan pemerintah dan skala 0 jika dalam perusahaan tidak terdapat kepemilikan pemerintah (Ghazali, 2007)

3.1.2.5 Keberadaan Wanita dalam Dewan Komisaris

Keberadaan wanita dalam dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pendekatan dikotomi yang menggunakan skala 1 jika di dalam perusahaan terdapat wanita dalam dewan komisaris dan skala 0 jika dalam perusahaan tidak terdapat wanita dalam dewan komisaris.

3.1.3 Variabel Kontrol

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan

Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor diluar yang tidak diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel control yaitu ukuran perusahaan (SIZE) dan profitabilitas (ROE).

Ukuran perusahaan adalah jumlah aktiva (aktiva tetap, aktiva tak berwujud dan aktiva lain – lain), jumlah penjualan, atau jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan sampai akhir periode pelaporan keuangan (Sembiring, 2005). Dalam penelitian ini menggunakan proksi *total asset* dalam pengukuran *firm size*. Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Size} = \log (\text{nilai buku total asset})$$

3.1.3.2 Profitabilitas

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Terdapat beberapa ukuran untuk menentukan profitabilitas perusahaan, yaitu : *return of equity, return on assets, earning per share, net profit dan operating ratio*. Namun dalam penelitian ini proksi yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan adalah return on equity (ROE) seperti Ho dan Wang (2001). ROE dapat diukur dengan menggunakan persamaan senagai berikut :

$$\text{Return on equity (ROE)} = \frac{\text{Net Income (laba bersih)}}{\text{Share holder's Equity (Modal Sendiri)}}$$

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pada sector finansial yang *listed* di Bursa Efek Indonesia. Menurut Fact Book BEI tahun 2010 jumlah perusahaan dalam sektor finansial yang listed sebanyak 69 yang merupakan besarnya populasi dalam penelitian ini. Sedangkan pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merupakan perusahaan yang memiliki *annual report* tahun 2010 yang dapat diakses dari *website* masing-masing perusahaan.
2. Mengungkapkan (*disclosure*) informasi tentang tanggung jawab sosial.

3. Data yang tersedia lengkap, baik data mengenai *corporate governance* perusahaan dan data lain yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan peneliti.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari:

1. Laporan tahunan perusahaan tahun 2010 yang dipublikasikan untuk umum yang diperoleh dari situs web resmi masing-masing perusahaan.
2. Jurnal, makalah, penelitian, buku, dan situs internet yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dan seluruh informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dokumen. Data yang dikumpulkan adalah data-data keuangan dalam laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak pada semua data regresi dapat diterapkan. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji Normalitas, uji Multikolinieritas, dan uji Heteroskedastisitas,

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji Normalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2006). Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik *normal probability plot* dan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*.

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik *normal probability plot* adalah (Ghozali, 2006):

1. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah Ghozali (2006):

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai *VIF* yang tinggi (karena $VIF=1/tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* > 10 .

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *Homoskedastisitas* dan jika berbeda disebut

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, maka dapat diuji dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya SRESID. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2006):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain dengan menggunakan *scatterplot*, untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan uji Geljser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolute residua lterhadap variabel independen (Gujarati,2003 dalam Ghozali, 2006). Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, yang dalam hal ini adalah absolut residual, maka ada indikasi terjadinya Heteroskedastisitas.

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel independen (Ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan saham oleh pemerintah, keberadaan wanita dalam dewan) dengan variabel dependen

(pengungkapan tanggung jawab sosial). Alasan lain penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda adalah karena penelitian ini menggunakan data parametrik, baik variabel dependennya maupun variabel independennya. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengolah data tersebut, agar dapat mendukung hipotesis yang telah dilakukan. Adapun tahap-tahap penghitungan dan pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung karakteristik implementasi GCG perusahaan yang diprosikan dalam Ukuran Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Kepemilikan Pemerintah, Keberadaan Wanita dalam Dewan, Ukuran perusahaan (*size*), dan profitabilitas perusahaan.
2. Menghitung indeks CSR yang diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan dengan menandingkan dengan standar yang digunakan.
3. Menghitung model regresi.

Metode regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan terhadap model yang diajukan peneliti dengan menggunakan software SPSS Versi 17.0 untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antara karakteristik GCG dengan pengungkapan CSR perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$CSRDI_i = \alpha_0 + \beta_1 UDK_i + \beta_2 DKI_i + \beta_3 KMA_i + \beta_4 PEM_i + \beta_5 WAN_i + \beta_6 SIZE_i + \beta_7 ROE_i + \varepsilon_i$$

Keterangan :

CSRDI: indeks pengungkapan CSR (Dependen)

α_0 : intercept

UDK : ukuran dewan komisaris

DKI : proporsi komisaris independen

KMA : proporsi komite audit independen

PEM : kepemilikan pemerintah

WAN : keberadaan wanita dalam dewan komisaris

SIZE : Ukuran Perusahaan (*control*)

ROE : Profitabilitas (*control*)

e : error term

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Terdapat dua jenis alat uji statistik, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik digunakan jika distribusi data yang digunakan normal, sedangkan data yang bersifat tidak normal menggunakan uji statistik non parametrik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian statistik parametrik.

Statistik parametrik digunakan apabila peneliti mengetahui fakta yang pasti mengenai sekelompok data yang menjadi sumber sampel (J. Supranto, 2001). Menurut Ghozali (2006) ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar uji statistik parametrik dapat digunakan, yaitu:

1. Observasi harus independen

2. Populasi asal observasi harus berdistribusi normal
3. Varians populasi masing-masing grup dalam hal analisis dengan dua grup harus sama
4. Variabel harus diukur paling tidak dalam skala interval.

Jika distribusi data bersifat normal, maka digunakanlah uji statistik parametrik. Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik. Untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti, maka akan dilakukan uji pengaruh simultan (*F test*), uji koefisien determinasi, dan uji pengaruh parsial (*t test*).

3.5.3.1 Uji Pengaruh Simultan (F test)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $f < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, yang berarti koefisien regresi signifikan. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila nilai signifikansi $f > 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak, yang berarti koefisien regresi tidak signifikan. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel independen.

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena R^2 mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan *adjusted* R^2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted* R^2 semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Parsial (t test)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. . Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $t < 0.05$ maka H_0 ditolak, berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen dengan variabel dependen.